

Memperkuat Ketahanan Nasional: Aktualisasi Bela Negara Melalui Literasi Digital

Rasona Sunara Akbar¹, Tatang Iskandar², Miko Dwi Abadi³, Safrudin Bachtiar⁴, M Ilham Khomaidi⁵, Tiara Okta Damayanti⁶, M Aditia Prasetyo⁷, Ruke Renhard⁸

¹Dosen Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi; Manajemen Teknologi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi²⁻⁸
E-mail : akbarrasona@gmail.com

Abstract

This research emphasizes the importance of digital literacy in strengthening national resilience and maintaining the nation's sovereignty in the digital era. Using qualitative analysis of secondary data, this research reveals that digital literacy involves effectively using technology and critically understanding and analyzing information. The method used in this research is a qualitative analysis of secondary data that includes regulations, policies, and initiatives related to digital literacy. The results show that digital literacy is essential in improving people's ability to use information and communication technology effectively and in understanding, analyzing, and using information critically to counter propaganda and fake news. The research also emphasizes the importance of integrating digital literacy education in the curriculum, learning programs, development of educational digital content, and related regulations. The study concludes that developing digital literacy programs that are inclusive and accessible to all levels of society is essential to strengthening national resilience.

Keywords: National Resilience; State Defense; Digital Literacy

PENDAHULUAN

Penguatan ketahanan nasional merupakan agenda penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, tantangan ketahanan nasional datang dari ancaman fisik dan ancaman digital. Oleh karena itu, mewujudkan nilai-nilai pertahanan negara melalui literasi digital merupakan hal yang relevan dan mendesak (Mufarriq, 2021). Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis. Dalam konteks bela negara, literasi digital dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara.

Bela negara melalui literasi digital dapat diwujudkan melalui pendidikan formal di sekolah. Kurikulum pendidikan hendaknya mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan kemampuan literasi digital agar peserta didik mahir dalam bidang teknologi, memiliki kepekaan terhadap isu-isu nasional, dan dapat berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Hal ini termasuk mengenalkan siswa akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, memahami dampak penyebaran berita palsu, dan mengembangkan kemampuan membedakan informasi yang konstruktif dan destruktif. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi warga digital yang bertanggung jawab, terampil memanfaatkan teknologi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

Selain itu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menyelenggarakan program literasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami dan menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks bela negara. Program-program ini harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam menggunakan alat-alat digital dan mengembangkan pemahaman kritis terhadap informasi yang diterima dan disebarluaskan melalui media digital. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilah informasi yang akurat dan relevan serta mampu mengidentifikasi dan menangkal berbagai bentuk propaganda dan misinformasi yang dapat mengancam ketahanan nasional (Suryatni, 2019).

Keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam program literasi digital juga penting untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan konstruktif. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan kampanye online yang menasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga orang tua, agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesadaran dan keterampilan yang sama dalam literasi digital.

Selain itu, perkembangan konten digital yang mendidik dan inspiratif juga signifikan. Konten

tersebut dapat berupa artikel, video, podcast, dan bentuk media lainnya yang informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kontennya harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mengedepankan pentingnya pertahanan negara dalam konteks modern sekaligus memberikan panduan praktis dalam mengamankan diri dari ancaman digital.

Pemanfaatan teknologi digital dalam program literasi juga harus diperhatikan. Pemanfaatan platform media sosial, aplikasi mobile, dan website dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas (Donoriyanto et al., 2023). Namun, upaya khusus harus dilakukan untuk memastikan bahwa program-program tersebut bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

Akhirnya, penting untuk terus mengevaluasi dan mengadaptasi program literasi digital. Evaluasi ini harus mencakup pengukuran efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan literasi digital di kalangan masyarakat serta dampaknya terhadap pemahaman dan partisipasi dalam upaya bela negara. Adaptasi program harus responsif terhadap perkembangan teknologi terkini dan perubahan dinamika sosial, memastikan bahwa literasi digital tetap relevan dan dapat diakses oleh semua orang. Dengan demikian, literasi digital dapat menjadi pilar kuat dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan aktualisasi bela negara di era digital.

METODE

Pendekatan yang penulis terapkan adalah yuridis normatif, yaitu kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengembangkan pembahasan terkait dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian kepustakaan, baik berupa tulisan ilmiah, karya, maupun sumber bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data meliputi pengolahan data, analisis, dan deskripsi hasil untuk mencapai berbagai pandangan terhadap data dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

A. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penguatan ketahanan nasional melalui literasi digital sebagaimana diuraikan, erat kaitannya dengan berbagai landasan hukum di Indonesia, termasuk UUD 1945 dan peraturan lainnya yang mendukung pengembangan literasi digital dan pertahanan negara. Pembukaan UUD 1945 ayat IV menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini menjadi landasan hukum dalam mengembangkan literasi digital di kalangan masyarakat untuk mencerdaskan bangsa, khususnya dalam tantangan era digital. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 juga memberikan penjelasan serupa (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, 1945).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 merupakan bagian dari konstitusi Indonesia yang menekankan kewajiban dan hak warga negara dalam rangka pertahanan negara. Pasal 27 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam pertahanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau militer saja melainkan tanggung jawab seluruh warga negara.

Sedangkan Pasal 30 Ayat (1) memperluas konteks tersebut dengan menekankan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Hal ini mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar pertahanan dalam konteks militer, mencakup aspek keamanan dalam berbagai dimensi, termasuk menjaga

kedaulatan negara, melindungi dari ancaman eksternal dan internal, serta menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Kedua pasal ini menegaskan bahwa pemerintah dan warga negara mempunyai tanggung jawab pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini mencerminkan doktrin pertahanan semesta, dimana seluruh elemen bangsa baik warga negara, TNI, Polri, dan komponen lainnya terlibat dalam sistem pertahanan negara yang komprehensif dan terpadu. Doktrin ini bertujuan untuk mempersiapkan negara dan masyarakat menghadapi segala ancaman dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya nasional.

Dalam konteks modern, pertahanan negara tidak hanya melalui sarana fisik, namun juga melalui literasi digital untuk melawan propaganda, berita bohong, dan ancaman lain di ruang digital yang dapat mengganggu kedaulatan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan literasi digital sangat penting dalam strategi pertahanan nasional. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menilai keaslian informasi yang diterima dan memahami cara berinteraksi dengan aman dan bertanggung jawab di ruang digital. Pendidikan literasi digital harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan program pembelajaran seumur hidup untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi terhadap keamanan informasi negara.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mengembangkan inisiatif dan kampanye literasi digital yang efektif yang berfokus pada aspek teknis dan memperkuat nilai-nilai nasional serta kesadaran akan pentingnya menjaga integritas informasi di ruang digital (Rahman et al., 2023). Dengan demikian, literasi digital dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan nasional di era digital, memungkinkan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara dari ancaman informasi yang semakin kompleks.

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) mendukung literasi digital dengan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Hal ini berkaitan dengan upaya literasi digital untuk memilah informasi yang konstruktif dan destruktif. Hal ini dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel dan membedakan fakta dan opini. Oleh karena itu, literasi digital meningkatkan akses terhadap informasi berkualitas dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memungkinkan mereka mengambil keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, literasi digital sangat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui peningkatan literasi digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses, memahami, dan menggunakan informasi publik yang tersedia, sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi kinerja pemerintah dan pengambilan keputusan publik secara aktif. Dengan demikian, literasi digital mendukung hak masyarakat untuk mengetahui dan memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

(Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2012) mengatur tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik serta penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam mendukung literasi digital. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan transaksi elektronik dilakukan dengan aman, efisien, dan andal, yang merupakan bagian integral dari literasi digital dalam meningkatkan ketahanan nasional. Dengan demikian, literasi digital berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi digital serta memahami dan menerapkan prinsip keamanan informasi untuk melindungi data pribadi dan transaksi elektronik dari

ancaman dunia maya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat infrastruktur digital nasional

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

(Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016) mengatur penggunaan dan transaksi informasi digital serta memberikan kerangka hukum untuk mengatur konten digital dan memerangi penyebaran informasi palsu, informasi atau hoax yang dapat mengancam ketahanan nasional. Dengan adanya kerangka hukum ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan platform digital lainnya serta lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di internet. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat untuk membangun kesadaran dan pemahaman akan pentingnya verifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan terkait literasi digital sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan beretika. Latihan tersebut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengguna dalam mengelola informasi digital serta memperkuat nilai-nilai penting dan etika dalam berkomunikasi di ruang digital.

B. Literasi Digital Berkontribusi Memperkuat Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Tantangan di Era Digital

Literasi digital sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama di era digital yang penuh dengan berbagai tantangan. Dalam konteks ini, literasi digital berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis. Hal ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara (Suriata, 2019).

Literasi digital dapat membantu masyarakat mengidentifikasi dan menangkal informasi palsu atau hoax yang dapat memecah belah persatuan. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memilah informasi yang kredibel dan tidak kredibel, sehingga mengurangi risiko disinformasi yang dapat merusak tatanan sosial dan politik. Hal ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah maraknya informasi di media sosial dan internet.

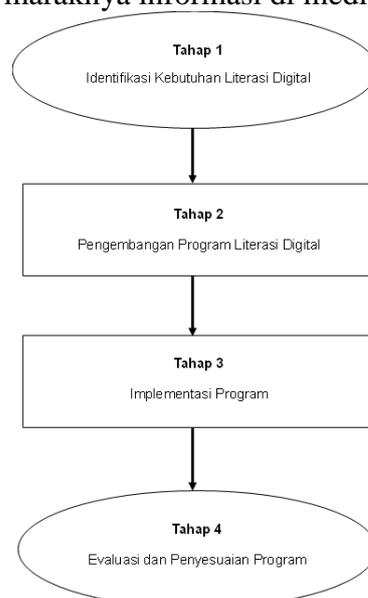


Diagram 1. Proses Peningkatan Literasi Digital

Diagram alir proses peningkatan literasi digital merupakan sebuah representasi visual yang menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat. Berikut penjelasan untuk setiap tahap:

1) Tahap 1: Identifikasi Kebutuhan Literasi Digital

Pada tahap ini, pengumpulan dan analisis data dilakukan untuk menentukan kebutuhan spesifik literasi digital dari target audiens. Hal ini melibatkan penilaian keterampilan literasi digital saat ini dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Proses ini dapat mencakup survei, wawancara, dan data sekunder untuk memahami kebutuhan spesifik komunitas atau kelompok sasaran.

2) Tahap 2: Pengembangan Program Literasi Digital

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, tahap ini melibatkan perancangan program literasi digital yang disesuaikan. Program ini dapat mencakup berbagai modul pelatihan yang mencakup aspek teknis penggunaan teknologi, pemahaman kritis terhadap informasi digital, dan keterampilan untuk berinteraksi secara aman dan bertanggung jawab di ruang digital. Pengembangan program juga mempertimbangkan metode pengajaran yang efektif dan inklusif untuk mencapai audiens target.

3) Tahap 3: Implementasi Program

Setelah program literasi digital dikembangkan, tahap selanjutnya adalah implementasi. Ini melibatkan penyelenggaraan sesi pelatihan, workshop, atau kursus baik secara online maupun offline. Implementasi program harus fleksibel dan dapat diakses oleh target audiens, termasuk penyediaan materi pelatihan dalam berbagai format dan melalui berbagai platform untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

4) Tahap 4: Evaluasi dan Penyesuaian Program

Proses peningkatan literasi digital melibatkan evaluasi dan penyesuaian program. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan feedback dari peserta, menilai kinerja program, dan menganalisis data penggunaan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki. Berdasarkan evaluasi, program disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya, yang mungkin termasuk revisi materi, metode pengajaran, dan strategi penerapan. Proses evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan esensial untuk memastikan program tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan literasi digital.

Literasi digital berperan dalam memperkuat demokrasi. Masyarakat yang melek digital akan lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi publik dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, literasi digital dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa partisipasi masyarakat didasarkan pada informasi yang akurat dan analisis yang kritis. Selain itu, literasi digital juga membantu dalam mengurangi penyebaran berita palsu dan misinformasi, yang seringkali mengganggu proses demokratis dan memecah belah masyarakat. Dengan kemampuan untuk memverifikasi sumber dan memahami konteks informasi, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berkontribusi pada diskusi publik yang lebih sehat dan konstruktif (Elizamiharti & Nelfira, 2023).

Dalam konteks pertahanan terhadap propaganda asing, literasi digital menjadi alat yang ampuh. Masyarakat yang literat digital dapat lebih mudah mengenali upaya-upaya propaganda yang bertujuan untuk menggoyahkan kedaulatan negara. Dengan demikian, literasi digital membantu dalam mempertahankan integritas nasional dan menghindarkan masyarakat dari pengaruh negatif yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Selain itu, dengan kemampuan literasi digital yang baik, individu dapat memilah dan memilih informasi yang kredibel serta menggunakan media sosial dan platform digital lainnya secara bertanggung jawab. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang seringkali menjadi salah satu bentuk propaganda (Rachmawati & Agustine, 2021). Dengan demikian, literasi digital tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman informasi palsu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dengan mempromosikan diskusi yang berbasis pada fakta dan

analisis kritis.

Pengembangan program literasi digital oleh pemerintah harus dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam menggunakan alat digital, tetapi juga untuk mengembangkan pemahaman kritis terhadap informasi yang diterima dan disebarkan melalui media digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat lebih bijak dalam memilah informasi yang akurat dan relevan, serta mampu mengidentifikasi dan menangkal berbagai bentuk propaganda dan misinformasi yang dapat mengancam ketahanan nasional (Hidayah et al., 2023). Selain itu, program-program literasi digital harus inklusif dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.

Hal ini menuntut adanya upaya khusus untuk mengatasi hambatan geografis, ekonomi, dan sosial yang mungkin menghalangi akses terhadap pendidikan dan sumber daya digital. Strategi yang dapat diterapkan meliputi penggunaan teknologi komunikasi yang beragam, seperti radio dan televisi untuk pelatihan literasi digital di daerah yang belum terjangkau internet, serta penyediaan fasilitas publik yang dilengkapi dengan akses internet gratis (Hidayanti et al., 2023). Dengan demikian, literasi digital tidak hanya menjadi alat pemberdayaan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kesatuan dan integrasi nasional, memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa di era digital.

C. Peran Kunci Pemerintah dan Organisasi Masyarakat dalam Menyelenggarakan Program Literasi Digital

Peran penting pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan program literasi digital bagi masyarakat sangatlah penting dan memiliki banyak aspek. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang memadai serta kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut secara bertanggung jawab dan kritis. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus mengambil inisiatif dalam merancang dan melaksanakan program literasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan produktif.

Salah satu peran penting pemerintah adalah pengembangan kurikulum dan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Cholilah et al., 2023). Hal ini mencakup pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan kemampuan literasi digital dalam pendidikan sekolah formal agar siswa mahir memanfaatkan teknologi, memiliki kepekaan terhadap isu-isu nasional, dan dapat berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencerminkan kebutuhan zaman ketika literasi digital menjadi keterampilan dasar yang penting dan sejalan dengan pembelajaran nilai-nilai kebangsaan (Rini et al., 2023). Hal ini akan membantu peserta didik menjadi pengguna teknologi yang kompeten dan warga negara yang bertanggung jawab dan kritis, mampu membedakan informasi benar dan salah serta memahami pentingnya menjaga kedaulatan negara di era digital.

Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil berperan dalam mengkomplementasi upaya pemerintah dengan menyediakan program-program literasi digital yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan workshop, seminar, dan kampanye online yang menargetkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga orang tua, agar semua lapisan masyarakat memiliki kesadaran dan keterampilan yang sama dalam literasi digital.

Kegiatan ini dapat mencakup pelatihan tentang cara mengidentifikasi berita palsu, memahami hak dan tanggung jawab di ruang digital, serta penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berdaya dalam menghadapi

tantangan era digital dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat yang informasinya akurat dan sehat (Ajani, 2023). Selain itu, program-program tersebut dapat juga mengajarkan tentang pentingnya privasi online dan cara melindungi data pribadi dari ancaman siber. Dengan memperkuat literasi digital, individu tidak hanya akan lebih waspada terhadap potensi bahaya di internet, tetapi juga akan lebih mampu memanfaatkan teknologi digital untuk keuntungan pribadi dan komunal. Hal ini termasuk memanfaatkan platform digital untuk pendidikan, bisnis, dan kegiatan sosial yang produktif. Dengan demikian, literasi digital menjadi kunci untuk membuka potensi penuh dari masyarakat yang terinformasi, terlibat, dan tangguh di era digital ini (Rizki et al., 2024).

Organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam pengembangan konten digital yang edukatif dan inspiratif. Konten-konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, dan bentuk media lainnya yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Konten tersebut harus mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mempromosikan pentingnya bela negara dalam konteks modern, sekaligus memberikan panduan praktis tentang cara mengamankan diri dari ancaman digital (Faridah et al., 2023). Konten yang dibuat harus mampu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi dan nasional, serta mengajarkan cara-cara untuk mengidentifikasi dan menghindari penipuan online, serangan siber, dan berbagai bentuk manipulasi informasi lainnya. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya meningkatkan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi ancaman di ruang digital.

Oleh karena itu, sangat penting bagi program literasi digital untuk mencakup aspek-aspek seperti keamanan siber, etika digital, dan kewarganegaraan digital. Ini akan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dapat mengakses dan menggunakan teknologi dengan efisien, tetapi juga bertanggung jawab dan aman dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Selain itu, dengan memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna internet, individu dapat lebih aktif berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang positif dan aman. Dengan demikian, literasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang resilien dan negara yang tangguh di era digital. Hal ini memungkinkan individu dan komunitas untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi tantangan yang dibawa oleh perubahan teknologi yang cepat, tetapi juga untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital untuk pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Jaelani & Hanim, 2021).

Dengan kemampuan literasi digital yang memadai, masyarakat dapat lebih efektif dalam mengakses, memilah, dan memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi dan kolektif, serta berpartisipasi secara aktif dalam diskursus publik dan proses demokrasi. Selain itu, literasi digital yang kuat juga membantu dalam memperkuat sistem pertahanan nasional melalui peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber, yang menjadi semakin relevan di era globalisasi dan konektivitas digital (Satrio et al., 2022). Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan program literasi digital merupakan langkah strategis yang harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi, sekaligus menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

SIMPULAN

Literasi digital sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan menjaga kedaulatan negara di era digital. Organisasi masyarakat sipil dan pemerintah mempunyai peran yang saling melengkapi dalam mengembangkan dan melaksanakan program literasi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program ini harus fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan mengembangkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis. Hal ini penting untuk melawan propaganda, berita palsu, dan ancaman lainnya di ruang digital. Integrasi pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dan program pembelajaran sepanjang hayat, serta kerja sama

antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, diperlukan untuk mengembangkan inisiatif dan kampanye literasi digital yang efektif. Selain itu, dukungan regulasi melalui undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai literasi digital sangat penting untuk memastikan keamanan transaksi elektronik dan melawan penyebaran informasi palsu. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya memperkuat ketahanan nasional dan demokrasi, tetapi juga memastikan Indonesia mampu menghadapi tantangan era digital dengan lebih tangguh dan terintegrasi. Kesadaran, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem digital akan menjadi pilar utama menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan makalah ini. Terima kasih kepada Bapak Rasona Sunara Akbar, atas bimbingan dan arahnya yang berharga. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman sejawat yang telah memberikan masukan dan pendapat yang membangun.

Tak lupa, ucapan terima kasih kami tujukan kepada keluarga kami yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi dalam menyelesaikan tugas ini. Semua bantuan dan dorongan yang diberikan telah sangat berarti bagi kesuksesan penyusunan makalah ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan sumber informasi dan referensi yang kami butuhkan untuk menyusun makalah ini. Tanpa kontribusi mereka, makalah ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Akhir kata, kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua yang telah berperan dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan kecil kami dalam dunia pengetahuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajani, A. T. (2023). Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Perilaku Pencarian Informasi Kesehatan pada Remaja di Sekolah. *Journal on Education*, 6(1), 1027–1034. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3036>
- Cholilah, M., Tatuwo, A. G. P., Komariah, & Rosdiana, S. P. (2023). Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(02), 56–67. <https://doi.org/10.58812/spp.v1i02.110>
- Donoriyanto, D. S., Indiyanto, R., Juliardi A. R., N. R., & Syamsiah, Y. A. (2023). Optimalisasi Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Online Store pada Pelaku UMKM di Kota X. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(1), 42–50. <https://doi.org/10.54783/ap.v4i1.22>
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2023). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- Faridah, S., Gustarina Cempaka Timur, F., Afifuddin, M., Studi Peperangan Asimetris, P., Strategi Pertahanan, F., Pertahanan Republik Indonesia, U., Bogor, K., & Jawa Barat, P. (2023). Karakter Bangsa dan Bela Negara: Menumbuhkan Identitas Kebangsaan dan Komitmen Nasionalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2532–2539. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5863>
- Hidayah, Y., Dwi Kurniawan, I., & Nawang Ginusti, G. (2023). JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (Print) Penggunaan Literasi Informasi untuk Pengembangan Watak Kewarganegaraan: Interaksi antara Pendidikan Kewarganegaraan, Teknologi dan Bahasa. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 65–75. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Hildayanti, S. K., Alie, J., & Setiadi, B. (2023). Merayakan Keanekaragaman Kita: Mempromosikan Inklusivitas, Pemahaman Budaya, Keterlibatan Masyarakat, dan Kebanggaan Komunitas. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 325–334. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.372>
- Jaelani, A., & Hanim, T. F. (2021). Teknologi Digital, Keberlanjutan Lingkungan, Dan Desa Wisata Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 237. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9613>
- Mufarriq, M. U. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Bela Negara Pemuda melalui Unit Kegiatan Mahasiswa

- Persaudaraan Setia Hati Terate. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 33–60. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2496>
- Rachmawati, T. S., & Agustine, M. (2021). Keterampilan literasi informasi sebagai upaya pencegahan hoaks mengenai informasi kesehatan di media sosial. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 9(1), 99. <https://doi.org/10.24198/jkip.v9i1.28650>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Rini, A. P., Firmansyah, N. F., Widiastuti, N., Christyowati, Y. I., & Fatirul, A. N. (2023). Pendekatan Terintegrasi dalam Pengembangan Kurikulum Abad 21. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 2(2), 171–182. <https://doi.org/10.55927/jiph.v2i2.3942>
- Rizki, A., Ilmi, M., Junaidi, A., Yusnanto, T., Kase, E. B. S., Safar, M., & Sari, M. N. (2024). Belajar Di Era Digital: Memahami Teknologi Pendidikan Dan Sumber Belajar Online. *Communnity Development Journal*, 5(1), 782–789.
- Satrio, J., Maryam, S., Ummah, A., & Tri Saputra Wahidin, D. (2022). Peningkatan Keterampilan Keamanan Siber bagi Pengelola Situs Desa Baros Kabupaten Serang. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 135–142. <https://doi.org/10.54082/jippm.35>
- Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 47–56. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1273/909>
- Suryatni, L. (2019). Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan Uud Nri 1945. *Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945*, 10(1), 49–62.
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, (1945). <https://pdn-web-staging.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 17 (2008). <https://peraturan.go.id/uu-no-14-tahun-2008>
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 82 (2012). <https://peraturan.go.id/pp-no-82-tahun-2012>
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 19 (2016). <https://peraturan.go.id/uu-no-19-tahun-2016>